

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas, Syed Hussein, 1983 , *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2010, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press;Yogyakarta
- Asikin,Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*”,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djaja, Ermasyah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi,Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafiika, Jakarta
- Fadjar, Abdul Mukhtie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Citra Media, Yogyakarta
- Hadjon, M.Philippus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Hamzah, Andi, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- , Andi,2008 *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M.Yahya, 2007,*Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej,O.S Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta
- Huda, Nimatul, 2015, *Hukum Tata negara Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Kaligis, O.C, 2011,*Deponeering Teori dan Pratik*,Alumni,Bandung

- Klitgard, David, 1998, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta
- Makara, Mohammad Taufik dan Suharsil, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta
- Prodjodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung
- Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Marta Buku, Yogyakarta
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta
- , Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sofyan, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Suyatno, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

B. Makalah

Artijo Alkostar, *“Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime”*, Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 18-21 November 2013

Hiariej, O.S Eddy, *“Telaah Kritis Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Expert Meeting”* Kerjasama Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Indonesian Court Monitoring dan Kemitraan, Yogyakarta, 12-13 Oktober 2006

C. Artikel Koran

Hiariej, O.S Eddy, *“Memahami Asas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah”*, Kompas, Rabu 21 Oktober 2002

D. Penulisan Hukum

Dianto, Danang 2010, *“Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Alasan Pembelaan terpaksa (Noodweer)”*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Herlambang, Rendy, 2015, *“Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa LHI)”*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Nuari, Adrie Primera, 2012, *“Penghentian Perkara Oleh Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Agung dalam Perkara Pidana Atas Nama Tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra M.Hamzah”*, Penulisan Hukum, program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

E. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76)

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
137)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67)

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 119)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation
Comission Against Corruption (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 36)

F. Website

Anonim, Penghentian Penyidikan, www.lib.ui.ac.id yang diunduh pada
tanggal 21 Desember 2012 pada pukul 16.65 WIB

Hiariej, O.S Eddy, “Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya
Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”,
www.antikorupsi.org_diakses pada tanggal 10 November 2015
pukul 13.45 WIB

Indonesia,International Transparency Corruption Perceptions Index 2013,
Scores and ranks 177 countries and territories from around the
world on the perceived level of corruption in the public sector,
dalam www.ti.or.id yang diakses pada tanggal 4 November 2015

Jimly Asshidiqie, Prinsip Pokok Negara Hukum menurut Jimly Assidiqie,
dalam <http://www.jimly.com/pemikiran/view/11>, diakses pada
tanggal 30 September 2015

Sugama, I Dewa Gede Dana , *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)*
Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, www.ojs.unud.ac.id yang diakses pada tanggal 13
November 2015